

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila daerah memiliki kapasitas keuangan yang memadai, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan terlaksana dengan baik. Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan menimbulkan siklus efek negatif, yaitu antara lain rendahnya tingkat pelayanan masyarakat (Ismail & Encong, 2019: 1). Faktor keuangan merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, makin besar pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian pula dalam hal pengelolaannya, semakin baik pengelolaan uang yang tersedia, maka semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. Demikian pentingnya faktor keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berbagai peraturan tentang hal tersebut telah dibuat dan sudah banyak mengalami perubahan, dimana pemerintah melakukan penyesuaian selaras dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada (Ismail & Encong, 2019: 1).

Menurut Ismail & Encong, (2019: 2) menjelaskan bahwa keuangan daerah berada pada posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah serta bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di

daerah juga menunjuk pada tingkat keotonomian suatu daerah. Mengingat, dengan kondisi keuangan daerah yang ada, pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan mengurus rumah tangga sendiri merupakan hakikat otonomi daerah, dan kemampuan daerah berotonomi berarti kemampuan dukungan keuangan sendiri untuk membiayai otonomi tersebut. Oleh sebab itu salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Untuk itu, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan dalam suatu daerah, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi serta menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, analisa kinerja keuangan perlu dilakukan untuk mendorong atau memotivasi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi otonomi daerah. Akibat meningkatnya kinerja keuangan maka secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Dilliana & Herdi , 2022: 10).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka kajian ini sangat menarik untuk dikaji kembali sehingga dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan pemerintah dalam mengelola semua aspek pendapatan dan pengeluaran yang ada. Kontribusi dari kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Daerah untuk mampu menggali

dan mengelola berbagai aset dan potensi sendiri yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain potensi daerah yang ada guna meningkatkan PAD dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan pembangunan ekonomi daerahnya (Dilliana & Herdi , 2022: 11).

Menurut Dilliana dan Herdi (2022: 20) menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan Menurut Wiratna (2017:71) kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan bersama. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari evaluasi terhadap kegiatan atau program yang digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Terkait dengan pentingnya kinerja, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu

organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. Dari penjelasan tersebut analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan. analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Menurut Ambya, (2023: 95), menjelaskan bahwa hasil analisis rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta melihat sejauh mana pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Oleh sebab itu dalam analisis penelian ini peneliti mengukur sejauh mana rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan dari laporan keuangan yang

disajikan.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti pada Desa Cendana Barat/ Oni. Hal ini dikarenakan Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Pemerintah Desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan perdesaan haruslah sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan desa dan pelayanan sosial masyarakat desa. Dengan kata lain, APBDesa merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah desa.

Desa oni selama ini penyusunan APBDes pada Desa oni masih dilakukan berdasarkan pertimbangan anggaran tradisional (*incremental budget*) maka seringkali mengabaikan kinerja keuangan dalam APBDes. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi atau pemborosan dan kebocoran sehingga memungkinkan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga

perusahaan yang bersifat komersial. Sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah desa masih sangat terbatas, Hal ini dikarenakan:

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan desa yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
2. Penyusunan APBDes sebagian besar masih dilakukan berdasarkan perimbangan anggaran tradisional (*incremental budget*) yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah persentase tertentu. oleh sebab itu sering kali mengabaikan rasio keuangan dalam APBDes. Penilaian keberhasilan APBDes sebagai penilaian pertanggungjawaban .
3. Pengelolaan keuangan desa lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBDesnya.

Maka dari itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis kinerja keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa. Untuk mengetahui kinerja pemerintah desa di Desa oni maka perlu dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Desa oni. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan yaitu berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran pendapatan dan belanja. Untuk itu, diperlukan suatu alat atau metode untuk menilai atau mengukur bagaimana kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan serta untuk mengetahui apakah sumber daya yang ada mengalami perubahan yang efektif dan pertumbuhan ekonominya dalam desa dapat mengalami peningkatan yang bermanfaat. Dari

penjelasan tersebut berikut ini adalah data yang dapat peneliti sajikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan APBD Daerah
Pemerintah Desa Oni Kabupaten TTS Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Perubahan	
		Absolute	%
2018	9,332,900.00	0	0
2019	9,300,000.00	(32,900.00)	(0.35)
2020	22,692,200.00	13,392,200.00	144.00
2021	15,639,000.00	(7,053,200.00)	(31.08)
2022	22,965,622.00	7,326,622.00	46.85

Sumber: Laporan Keungan Desa Oni tahun 2018-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa PAD Desa Oni pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2018 PAD Desa Oni sebesar Rp9.332.900. Pada tahun 2019, PAD Desa Oni mengalami penurunan sebesar Rp9.300.000 dengan tingkat presentase perubahan sebesar 0.35%. Pada tahun 2020 PAD Desa Oni mengalami peningkatan sebesar Rp22,692,200 dengan tingkat presentase perubahan sebesar 144%. Pada tahun 2021 PAD Desa Oni mengalami penurunan sebesar Rp15,639,000 dengan tingkat presentase perubahan sebesar 31.08%. Pada tahun 2022, PAD Desa Oni kembali mengalami peningkatan sebesar Rp22,965,622 dengan tingkat presentase perubahan sebesar 46.85%. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. pendapatan asli daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari data yang diperoleh Pendataan Asli Daerah bersumber dari objek pajak, subyek pajak dan wajib pajak Pendataan obyek retribusi, subjek retribusi dan wajib retribusi, Pendataan sumber

penerimaan bukan pajak, Pendataan lain-lain pendapatan yang sah.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh D. Anugerahari dan Adi Yuniarta (2022) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019”. Dengan hasil penelitian menunjukkan dari tahun 2015 - 2019 berdasarkan rasio kemandirian keuangan masih sangat rendah, berdasarkan rasio efektivitas sudah sangat efektif, berdasarkan rasio efisiensi masih kurang efisien, berdasarkan rasio aktivitas, untuk rasio belanja operasi tergolong cukup baik dan rasio belanja modal tergolong baik, berdasarkan rasio pertumbuhan mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan kategori sedang.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Nurhayati (2016) dengan judul “Analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bonto Tenggara Kabupaten Sinjai” dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa bonto tengnga kabupaten sinjai tahun 2016 rasio kemandirian desa berada pada tingkat sedang, rasio efektivitas berada pada tingkat tidak efektif, dan rasio efisiensi berada pada tingkat sangat efisien. Sedangkan pada tahun 2017 kinerja keuangan pemerintah desa bonto tenanga kabupaten sinjai rasio kemandirian desa berada pada tingkat tinggi, rasio efektivitas berada pada tingkat cukup efektif dan rasio efisien berada pada tingkat sangat efisien. Kemudian tahun 2018 rasio kemandirian desa berada pada tingkat tinggi, rasio efektivitas berada pada tingkat efektif, dan rasio efisiensi berada pada tingkat sangat efisien.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Kantor Desa Oni Kabupatn TTS”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah **“Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Kantor Desa Oni Kabupaten TTS”**.

1.3. Persoalan Penelitian

Persoalan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kantor Desa Oni Kabupaten TTS jika diukur dengan rasio kemandirian?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kantor Desa Oni Kabupaten jika diukur dengan rasio efektivitas ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kantor Desa Oni Kabupaten jika diukur dengan rasio efisiensi?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kantor Desa Oni Kabupaten jika diukur dengan rasio aktivitas?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kantor Desa Oni Kabupaten jika diukur dengan rasio pertumbuhan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah jika diukur menggunakan rasio kemandirian
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah jika diukur menggunakan rasio efektivitas .
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Daerah jika diukur dengan menggunakan rasio efisiensi.
4. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah jika diukur menggunakan rasio aktivitas.
5. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah jika menggunakan rasio pertumbuhan

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ilmu manajemen khususnya dalam kajian ekonomi keuangan daerah dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (UKAW).

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi kepada kantor Desa Cendana Oni dalam kaitannya mengenai kinerja keuangan dalam mengelola keuangan Desa di masa yang akan datang.